

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024

*Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah Kabupaten Jombang*



[bappeda.jombang@gmail.com](mailto:bappeda.jombang@gmail.com)



[www.bappeda.jombangkab.go.id](http://www.bappeda.jombangkab.go.id)

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan petunjuk-Nya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 ini merupakan dokumen yang di dalamnya memuat akuntabilitas dan pencapaian kinerja selama satu tahun. Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah inilah Bappeda Kabupaten Jombang melaporkan kinerja yang diukur dari pencapaian misi, sasaran strategis, program, serta kegiatan di tahun 2024.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang pada tahun 2024. Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna dan berharap bahwa dengan adanya penyajian laporan ini dapat menjadi pemacu untuk dapat mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Jombang Tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan informasi guna peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang di tahun-tahun berikutnya.

Jombang, Januari 2025

Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah  
Kabupaten Jombang



Danang Praptoko, S.T., M.T.  
Pembina Tingkat I  
NIP 197404161999011002

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Struktur Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasar dari Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 3/D).

Sebagai unsur pelaksana, sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi seperti di bawah ini.

Gambar 1.1  
Susunan Organisasi  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang



### 1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang, maka dapat diketahui tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai berikut.

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan
  - b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan
  - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan
  - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan, dan
  - e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **1.3 Isu-Isu Strategis**

Umumnya isu-isu strategis dapat berasal dari internal maupun eksternal. Berikut merupakan beberapa isu yang melingkupi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang.

1. Masih kurangnya kuantitas maupun kualitas aparatur perencana;
2. Kurangnya ketersediaan data secara terpadu untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah;
3. Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan pusat dan daerah;
4. Belum terintegrasinya sistem informasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
5. Belum efektifnya sistem pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;
6. Belum optimalnya penelitian dan pengembangan pada pemerintah daerah.

#### 1.4 Data Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang memiliki sejumlah pegawai negeri sipil. Para pegawai di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang memiliki berbagai macam kemampuan yang salah satunya diukur dengan menggunakan tingkat pendidikan. Adapun tingkat pendidikan pegawai negeri sipil di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1

##### Tingkat Pendidikan Pegawai

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang 2024

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah Pegawai</b>
SLTA	3 Orang
Diploma (D3)	8 Orang
Sarjana (S1)	18 Orang
Magister (S2)	15 Orang
Jumlah	44 Orang

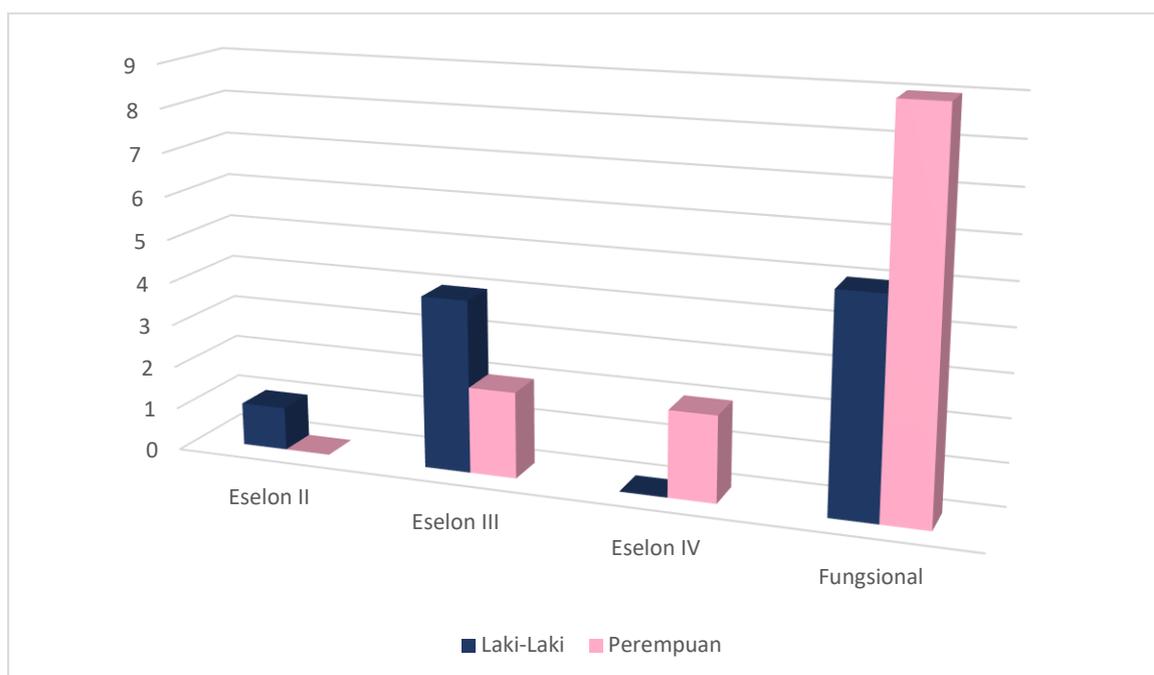
Berdasarkan tabel tingkat pendidikan pegawai tersebut, dapat kita ketahui bahwasanya jumlah pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang paling banyak adalah pegawai dengan tingkat pendidikan sarjana atau strata I dan yang paling sedikit adalah pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA. Adapun apabila dihubungkan dengan jabatan, maka dapat diketahui bahwa untuk jabatan struktural dengan jumlah 9 pegawai, rata-rata tingkat pendidikannya adalah Magister (Strata 2) dengan rincian 6 pegawai merupakan lulusan Strata 2 sedangkan 3 orang merupakan lulusan Strata 1. Adapun untuk pejabat fungsional yang berjumlah 14 orang, maka diketahui bahwa 8 pegawainya merupakan lulusan Magister (Strata 2) dan 6 pegawai lainnya merupakan lulusan Sarjana (Strata 1).

Selain dilihat dari tingkat pendidikan, komposisi pegawai dalam hal ini adalah pejabat struktural dan fungsional di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang, juga dilihat dari jenis kelamin. pejabat struktural yang menduduki Eselon III terdiri dari 4 pegawai laki-laki

dan 2 pegawai perempuan sedangkan pejabat struktural yang menduduki Eselon IV terdiri dari 2 pegawai perempuan. Adapun untuk pejabat fungsional, terdapat 9 pegawai yang berjenis kelamin perempuan dan 5 pegawai yang berjenis kelamin laki-laki. Jumlah pejabat berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 1.1

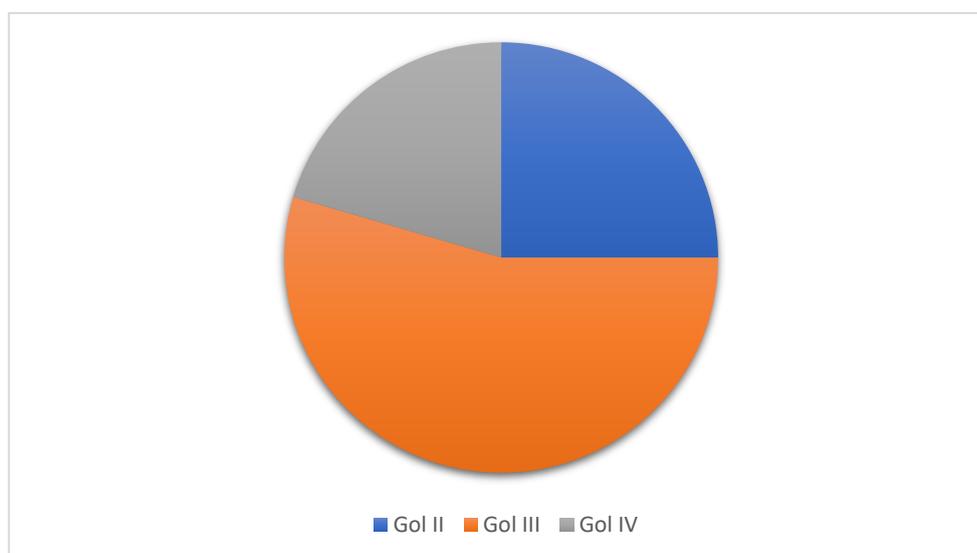
## Komposisi Pejabat Struktural dan Fungsional Berdasarkan Jenis Kelamin



Berdasarkan komposisi pegawai di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut,

Grafik 1.2

## Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan



### **1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana**

Fungsi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat terlaksana dengan baik dikarenakan adanya dukungan dari sarana dan prasarana yang memadai dengan kualitas yang baik. Sarana prasarana tersebut dapat berupa yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki beberapa kendaraan yang digunakan untuk memperlancar mobilitas pegawai dengan kendaraan roda empat sebanyak 6 unit. Kemudian kendaraan roda dua sebanyak 18 unit de. Selain itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang juga memiliki gedung kantor dengan tiga ruang rapat yang ditempati oleh 44 pegawai dan 5 tenaga ahli.

### **1.6 Keuangan**

Dukungan terkait dengan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang pada tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Jombang. Pada tahun anggaran 2024, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki anggaran sebesar Rp14.840.900.449 yang mana sejumlah Rp6.926.755.174 merupakan anggaran untuk gaji dan tunjangan pegawai sedangkan sisanya yaitu Rp7.914.145.275 merupakan anggaran langsung yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan dengan sasaran strategis maupun program-program pendukung.

### **1.7 Cascading Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang**

Tujuan dan sasaran RPD ditindaklanjuti ke dalam tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang.

Berdasarkan RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024—2026, dapat diketahui bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terkait dengan pencapaian misi pertama RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional” dengan tujuan “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan dan Efektif

serta Penyelenggaraan Layanan Publik yang Berkualitas.” Indikator tujuan RPD dari misi pertama ini adalah *Indeks Good Governance*.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mendukung sasaran RPD yaitu “Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi” dengan indikator sasaran “Indeks Reformasi Birokrasi”. Indikator sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang adalah “Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi“. Adapun sasaran strategis dari tujuan tersebut meliputi tiga hal berikut.

- (1) Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (2) Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah;
- (3) Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Keterkaitan RPD Kabupaten Jombang dengan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang tergambar sebagaimana berikut.

Gambar 1.2  
Keterkaitan RPD Kabupaten Jombang dengan  
Renstra Bappeda Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026



Cascading Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang selengkapnya dapat dilihat sebagaimana terlampir.

### 1.8 Peta Proses Bisnis

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang memiliki Proses Bisnis yang digunakan untuk memperjelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing proses di dalam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Gambar 1.3  
Proses Bisnis Level 0



Pada proses bisnis level 0 Bappeda Kabupaten Jombang Tahun 2024, diketahui bahwa pada level ini meningkatkan tata kelola pemerintahan yang professional, akuntabel, inovatif, transparan, dan efektif serta penyelenggaraan digitalisasi layanan publik. Level 0 proses bisnis merupakan level tertinggi yang ada pada Bappeda dan menggambarkan alur bisnis secara keseluruhan.

Proses Bisnis Level 0 tersebut dilanjutkan dengan Proses Bisnis Level 1 kemudian Proses Bisnis Level 2 seperti di bawah ini.

Gambar 1.4  
Proses Bisnis Level 1

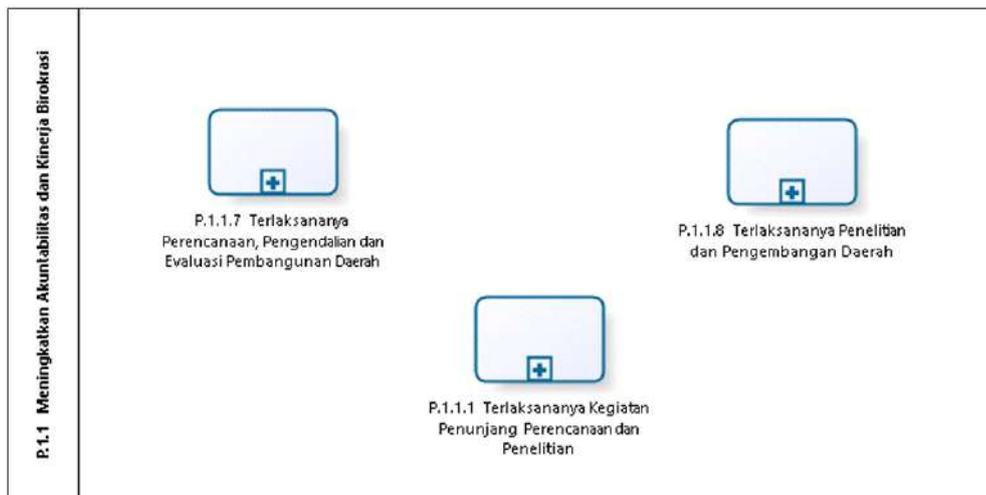


Proses Bisnis Level 1 ini menggambarkan tujuan yang harus dicapai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang yaitu Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi.

Dari proses bisnis level 1 tersebut, kemudian dilanjutkan dengan proses bisnis level 2. Pada proses bisnis ini diketahui bahwasanya terdapat tiga proses bisnis

utama yang harus dilaksanakan pada Bappeda. Proses yang pertama adalah terlaksananya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Proses kedua adalah terlaksananya penelitian dan pengembangan daerah. Kemudian proses ketiga adalah terlaksananya kegiatan penunjang perencanaan dan penelitian. Proses bisnis level 2 ini akan terus dilanjutkan sampai pada level-level paling bawah yang ada.

Gambar 1.5  
Proses Bisnis Level 2



### 1.9 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

Evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan sekaligus dapat mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Adapun secara khusus tujuan dari implementasi SAKIP ini seperti memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP. Oleh karena itu, telah dilakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 dengan hasil yang tertera pada surat nomor X.700/525/415.15/2024 tentang Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 dengan Nilai Hasil Evaluasi sebesar 83,39 dengan kategori A atau memuaskan. Dari evaluasi tersebut, terdapat beberapa hal yang direkomendasikan agar dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu seperti di bawah ini.

1. Meningkatkan kualitas perencanaan melalui tahapan penjenjangan kinerja sesuai ketentuan dimulai dari identifikasi masalah berdasarkan data yang

jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dan terus melibatkan seluruh pegawai melalui penjangkaran ide/masukan dalam seluruh proses perencanaan.

2. Melakukan koreksi atas ketidakselarasan capaian kinerja antar dokumen Pengukuran Kinerja (Kurja) Tribulanan, dokumen Evaluasi SKP Tribulanan, serta dokumen Monitoring Evaluasi Rencana Aksi Tribulanan.
3. Melakukan koreksi pada Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang tentang Mekanisme Pemberian *Reward* dan *Punishment* di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang dengan menambahkan kriteria rinci untuk pemberian *punishment & reward*.
4. Meningkatkan kualitas pengukuran dan evaluasi kinerja dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan evaluasi untuk merencanakan periode selanjutnya. Selain itu, penting untuk memperhatikan kinerja organisasi di atasnya agar dapat diketahui apakah kinerja individu/Perangkat Daerah telah cukup menunjang kinerja organisasi di atasnya yang selanjutnya dapat dijadikan dasar dalam pemberian penghargaan maupun sanksi individu.
5. Melakukan internalisasi semangat perbaikan berkelanjutan kepada seluruh pegawai dan terus mengembangkan inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada. Proses tersebut dijelaskan pada laporan kinerja melalui proses analisis yang tepat sehingga dapat menjadi gambaran kondisi eksisting yang akurat sebagai bahan evaluasi dan dapat dirumuskan strategi perbaikan pada periode berikutnya.
6. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebelumnya untuk perbaikan dan peningkatan capaian kinerja *outcome* berikutnya (sebagaimana kondisi).

### **1.10 Sistematika Lapoaran Kinerja Instansi Pemerintah**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Jombang tahun 2021 mendasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati

Jombang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi, serta pengembangan informasi yang memuat tentang alasan disusun lkjip/manfaat lkjip, struktur organisasi, tugas dan fungsi bappeda Kabupaten Jombang, Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis, ringkasan laporan hasil evaluasi sakip serta potensi yang menjadi ruang lingkup pd dan sistematika penulisan LKjIP.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis Rencana Kinerja Tahun yang bersangkutan. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

### LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
3. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja
4. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi
5. Pengukuran Kinerja

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Perencanaan Strategis**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan yang berlaku untuk periode lima tahun yang mana dihitung sejak dilantiknya Kepala Daerah sampai dengan berakhirnya jabatan Kepala Daerah.

Rencana Strategis atau Renstra merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode lima tahun. Perubahan Renstra pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang merupakan bentuk dari dukungan terhadap terlaksananya RPJMD Kabupaten Jombang Tahun.

Pada periode tahun 2024-2026, Kabupaten Jombang memiliki visi “Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing” dengan misinya yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional”. Adapun tujuan dari Kabupaten Jombang adalah “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Layanan Publik yang Berkualitas” dengan indikator tujuan Indeks Good Governance.

Tujuan Kabupaten Jombang tersebut didukung dengan tujuan Bappeda yang mana tertulis “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Birokrasi.” Indikator tujuan Bappeda tersebut juga mendukung indikator sasaran RPD yaitu nilai Indeks Reformasi Birokrasi atau IRB. Kemudian tujuan dari Bappeda didukung dengan beberapa indikator sasaran seperti Indeks Kualitas Perencanaan, Indeks Kualitas Kelitbangan dan Inovasi Daerah, dan Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah.

Adapun Keterkaitan Sasaran Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024—2026 tertuang pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1  
Cascading Renstra Bappeda Tahun 2024—2026 dengan  
RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024—2026

Visi	Misi	Tujuan P-RPJMD	Indikator Tujuan P-RPJMD	Sasaran P-RPJMD	Indikator Sasaran P-RPJMD	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Tujuan/Sasaran OPD	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Renstra pada Tahun		
									2024	2025	2026
Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Layanan Publik yang Berkualitas	Indeks Good Governance	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)			
							Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan (IKP)	94,51	94,76	95,01
							Meningkatnya Kualitas Kelitbangan dan Inovasi Daerah	Indeks Kualitas Kelitbangan dan Inovasi Daerah (IKKID)	83,86	85,66	87,09
							Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80,65	83,40	83,41

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				<b>14.840.900.449</b>
<b>5 01</b>	<b>PERENCANAAN</b>				13.546.661.269
<b>5 01 01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	9.245.369.974
<b>5 01 01 2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai aturan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	110.847.700
5 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	106.898.500
5 01 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	5 laporan	3.949.200
<b>5 01 01 2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	7.118.927.374
		<b>Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
5 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/Bulan	44 Orang/Bulan	6.926.755.174
5 01 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	186.166.000
5 01 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1.698.200

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif  (Rp)
5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 laporan	16 laporan	4.308.000
5	01	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD BAPPEDA</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>27.600.000</b>
5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	46 Paket	45 Paket	27.600.000
5	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>94%</b>	<b>94%</b>	<b>1.050.333.106</b>
5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	36.784.200
5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 paket	19 paket	341.447.400
5	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	13.750.900
5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	17 paket	17 paket	175.351.100
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	41.274.000
5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	36 Dokumen	6.000.006
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 laporan	35 laporan	435.725.500
5	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>497.094.594</b>

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif  (Rp)
5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	14 laporan	14 laporan	153.115.474
5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 laporan	13 laporan	343.979.120
5	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>94%</b>	<b>440.567.200</b>
5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	2 unit	76.710.000
5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 unit	21 unit	211.760.000
5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit	15.897.200
5	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	158 unit	158 unit	136.200.000
5	01	02			<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase Keselarasan Program RKPD dengan RPJMD.</b>	<b>71,30%</b>	<b>55,89%</b>	<b>1.567.556.415</b>
						<b>Persentase Capaian Kinerja Program RKPD yang mencapai target.</b>	<b>94,21%</b>	<b>88,44%</b>	
5	01	02	2.01		<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.170.752.500</b>
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 dokumen	4 dokumen	1.170.752.500

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif  (Rp)
5	01	02	2.02		<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase analisis data dan informasi yang dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>221.205.000</b>
5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	4 Dokumen	4 dokumen	221.205.000
5	01	02	2.03		<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase program RKPD dengan capaian kinerja kategori tinggi</b>	<b>100%</b>	<b>87%</b>	<b>175.598.915</b>
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	8 Laporan	8 Laporan	175.598.915
5	01	03			<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase Keselarasan Program RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD</b>	<b>85,31%</b>		<b>2.733.734.880</b>
5	01	03	2.01		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Persentase Keselarasan Program Renja PD dengan RKPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia</b>	<b>96,92%</b>		<b>743.494.300</b>
5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	68 dokumen	68 dokumen	234.752.150
5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	5 Laporan	5 Laporan	79.506.400
5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	15 dokumen	15 dokumen	288.758.200

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif  (Rp)
5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	7 laporan	7 laporan	140.477.550
5	01	03	2.02		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Persentase Keselarasan Program Renja PD dengan RKPD bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam</b>	<b>95,38%</b>	<b>99%</b>	<b>981.279.356</b>
5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	22 dokumen	22 dokumen	339.543.000
5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4 laporan	4 laporan	393.728.213
5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9 dokumen	9 dokumen	137.428.893
5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2 laporan	2 laporan	110.579.250
5	01	03	2.03		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah</b>	<b>Persentase Keselarasan Program Renja PD dengan RKPD bidang infrastruktur dan wilayah</b>	<b>87,00%</b>		<b>1.008.961.224</b>
5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9 dokumen	9 dokumen	213.798.974
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 laporan	2 laporan	161.737.350

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif  (Rp)
5 01 03 2.03 0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	11 dokumen	11 dokumen	489.173.650
5 01 03 2.03 0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 laporan	2 laporan	144.251.250
<b>5 05</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>				<b>1.294.239.180</b>
<b>5 05 02</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan</b>	<b>88,57%</b>		<b>1.294.239.180</b>
		<b>Jumlah Capaian Inovasi Daerah</b>	<b>45 Inovasi</b>		
<b>5 05 02 2.01</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>Jumlah dokumen hasil kelitbangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang dimanfaatkan</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>227.039.000</b>
5 05 02 2.01 0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	2 laporan	2 Laporan	227.039.000
<b>5 05 02 2.02</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>Persentase hasil kelitbangan bidang sosial dan kependudukan yang dimanfaatkan</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>305.570.000</b>
5 05 02 2.02 0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	4 dokumen	4 Dokumen	305.570.000
<b>5 05 02 2.03</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>Jumlah dokumen hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dimanfaatkan</b>	<b>5 dokumen</b>	<b>5 dokumen</b>	<b>430.587.500</b>
5 05 02 2.03 0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	4 dokumen	4 Dokumen	325.388.500
5 05 02 2.03 0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 dokumen	1 dokumen	105.199.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2024	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif  (Rp)
<b>5</b>	<b>05</b>	<b>02</b>	<b>2.04</b>		<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>Jumlah inovasi krenova</b>	<b>80 Inovasi</b>	<b>80 Inovasi</b>	<b>331.042.680</b>
5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	4 dokumen	4 dokumen	293.847.180
5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	2 Laporan	2 Laporan	37.195.500

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dilaksanakan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut.

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
  - a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
  - b. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
  - c. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
  - a. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
  - b. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
  - c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
  - a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
  - b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
  - c. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
  - d. Pengembangan Inovasi dan Teknologi
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

## 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 tertera pada tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2  
Indikator Kinerja Utama  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024

Tugas Pokok	Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan			
Fungsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan</li> <li>2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan</li> <li>3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan</li> <li>4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan</li> <li>5. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya</li> </ol>			
Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan (IKP)	Indeks Kualitas Perencanaan (IKP) diukur berdasarkan tiga aspek, yaitu seperti berikut.	- Laporan Pengukuran IKP - Kertas Kerja Pengukuran IKP	Sekretaris, Kepala Bidang Dalev,

Pembangunan Daerah			Aspek	Bobot	Variabel	Pengukuran IKP (Indeks Kualitas Perencanaan) melalui penghitungan secara dokumentatif. Pengukuran dilakukan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nomor : 188/668/415.42/2021 tentang Pengukuran Indeks Kualitas Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang. Pengukuran dilakukan melalui 3 aspek yaitu . 1. Aspek Proses 2. Aspek Isi 3. Aspek Tindaklanjut Hasil Perencanaan Masing-masing aspek sebagaimana tersebut di	Praswil, Ekonomi, PPM
			Proses	20%	1. Persentase Penyelenggaraan Musrenbangcam sesuai kaidah perencanaan (Ketepatan waktu & Keterlibatan unsur Masyarakat) 2. Persentase Penyelenggaran Musrenbang Kabupaten Sesuai Kaidah Perencanaan (Ketepatan waktu & Keterlibatan unsur Masyarakat)		
			Isi	50%	1. Persentase Usulan Musrenbang yang Diakomodasi dalam RKPD 2. Persentase Keselarasan Program RKPD dengan RPJMD		

				<p>3. Persentase Keselarasan Renja PD dengan RKPD</p> <p>4. Persentase Dokumen Perencanaan ditetapkan Tepat Waktu</p>	<p>atas terdiri dari beberapa variabel.</p> <p>Bobot masing-masing aspek Indeks Kualitas Perencanaan pada sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nomor : 188/668/415.42/2021 sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aspek Proses dengan bobot 20 %</li> <li>2. Aspek Isi dengan bobot 50%</li> <li>3. Aspek tindaklanjut hasil perencanaan dengan bobot 30%</li> </ol>
		<p>Tindak Lanjut Hasil Perencanaan</p>	<p>30%</p>	<p>Persentase Capaian Program dalam RKPD Kategori Tinggi</p>	

$$IKP = (20\% \times \text{Nilai Aspek Proses}) + (50\% \times \text{Nilai Aspek Isi}) + (30\% \times \text{Tindak Lanjut Hasil Perencanaan})$$

<p>Meningkatnya Kualitas Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah</p>	<p>Indeks Kualitas Kelitbangan dan Inovasi Daerah (IKKID)</p>	<p> <math>SPD = \sum_{i=1}^{15} \text{Skor Indikator Satuan Pemda ke } i</math>  <math>\text{Skor Jumlah Inovasi} = \text{Jumlah Inovasi} \times 0,38</math>  <math>SID = \frac{\sum_{j=1}^n (\sum_{i=1}^{15} \text{Skor Indikator Satuan Inovasi ke } i) \text{ Inovasi ke } j}{n} + \text{Skor Jumlah Inovasi}</math>  <b><math>\text{Skor Total} = SPD + SID</math></b> </p> <p>Keterangan:  n adalah Jumlah Inovasi Daerah suatu Pemerintah Daerah  i adalah nomor indikator  j adalah nomor inovasi  SPD adalah Indikator Satuan Pemerintahan Daerah  SID adalah Indikator Satuan Inovasi Daerah</p> <p>Penghitungan Indeks Inovasi Daerah</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <math display="block">\text{Indeks Inovasi Daerah} = \frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Total Maksimum}} \times 100</math> </div> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Skor Total Maksimum diperoleh dari penjumlahan Skor Maksimal Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Maksimal Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID).</li> <li>- Skor Total Maksimum adalah 250.</li> <li>- Skala IID adalah 0 s.d. 100.</li> </ul>	<p>IKKID diperoleh dari rumus penjumlahan (0,40) Indeks Kelitbangan, (0,35) Indeks Krenova dan (0,25) Indeks Inovasi Daerah.</p> <p>Indeks Kelitbangan merupakan persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.</p> <p>Indeks Krenova merupakan nilai skor banyaknya inovasi peserta krenova.</p> <p>IID merupakan Indeks Inovasi Daerah dari Kemendagri.</p>
---	---	---	--

		<p>Dengan proporsi aspek sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aspek Satuan Pemerintahan Daerah (25,20%), terdiri dari:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 3 Variabel;</li> <li>2) 15 Indikator; dan</li> <li>3) Jumlah Skor Maksimal SPD senilai 63 (25,20%).</li> </ol> </li> <li>- Aspek Satuan Inovasi Daerah (74,80%), terdiri dari:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 5 Variabel;</li> <li>2) 21 Indikator (20 indikator SID senilai 111 atau 44,40% dan 1 indikator Jumlah Inovasi apabila maks. senilai 76 atau 30,40%); dan</li> <li>3) Jumlah Skor Maksimal SID senilai 187 (74,80%).</li> </ol> </li> </ul> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Rentang Skor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sangat Inovatif</td> <td>60,01 - 100,00</td> </tr> <tr> <td>Inovatif</td> <td>35,00 – 60,00</td> </tr> <tr> <td>Kurang Inovatif</td> <td>0,01 - 34,99</td> </tr> <tr> <td>Tidak Dapat Dinilai</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"> <math display="block">\text{IKKID} = (40\% \times \text{Indeks Kelitbangan}) + (35\% \text{ Indeks Krenova}) + (25\% \times \text{Indeks Inovasi Daerah})</math> </p>	Kategori	Rentang Skor	Sangat Inovatif	60,01 - 100,00	Inovatif	35,00 – 60,00	Kurang Inovatif	0,01 - 34,99	Tidak Dapat Dinilai	0		
Kategori	Rentang Skor													
Sangat Inovatif	60,01 - 100,00													
Inovatif	35,00 – 60,00													
Kurang Inovatif	0,01 - 34,99													
Tidak Dapat Dinilai	0													
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja	Nilai Evaluasi AKIP	<p>Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP PD oleh Tim APIP Penyelenggaraan SAKIP meliputi:</p> <p>a. rencana strategis;</p>	Hasil Penilaian Evaluasi AKIP Badan Perencanaan											

Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	b. Perjanjian Kinerja; c. pengukuran Kinerja; d. pengelolaan data Kinerja; e. pelaporan Kinerja; f. reviu dan evaluasi Kinerja.	Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang	
------------------	------------------	---	--------------------------------------	--

### 2.3. Persandingan Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Jombang dengan Bappeda Provinsi Jawa Timur dan Bappenas

Tabel 2.3

Persandingan Sasaran dan Indikator Sasaran Tahun 2024 pada Bappeda Kabupaten Jombang dengan Bappeda Provinsi Jawa Timur dan Bappenas

No.	Bappenas		Bappeda Provinsi Jawa Timur		Bappeda Kabupaten Jombang		Keterangan
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	
1.	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	Meningkatnya Capaian Program Pembangunan	Persentase Capaian Target Program	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan (IKP)	Pengukuran IKP terdiri dari beberapa aspek sebagai berikut: 1) Aspek Proses 2) Aspek Isi 3) Aspek Tindaklanjut hasil perencanaan Masing-masing aspek terdapat variabel yaitu sebagai berikut: 1. Variabel aspek Proses 1.1. Persentase Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan sesuai Kaidah perencanaan
	Terwujudnya efektivitas pengendalian	Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional					

No.	Bappenas		Bappeda Provinsi Jawa Timur		Bappeda Kabupaten Jombang		Keterangan
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	
	pembangunan nasional						<p>1.2. Persentase Penyelenggaraan Musrenbang Kabupat</p> <p>1.3. en sesuai kaidah perencanaan</p> <p>2. Variabel aspek Isi</p> <p>2.1 Persentase Usulan Musrenbang Yang Diakomodir Dalam RKPD</p> <p>2.2 Persentase Keselarasan Program RKPD dengan RPJMD</p> <p>3. Variabel Aspek Tindak Lanjut Hasil Perencanaan</p> <p>3.1 Persentase Capaian Program dalam RKPD dengan Kategori Tinggi</p>
2.	Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L			Meningkatnya Kualitas Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah	Indeks Kualitas Kelitbangan dan Inovasi Daerah (IKKID)	Mendasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 002.6/3857/SJ tanggal 06 Juli 2022 hal Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah serta Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2022
3.	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP	Meningkatnya Akuntabiilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Sinergis dengan Indikator di Badan Perencanaan Pembangunan Daeah Provinsi Jawa Timur

No.	Bappenas		Bappeda Provinsi Jawa Timur		Bappeda Kabupaten Jombang		Keterangan
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	
	profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM						

#### 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) adalah dokumen yang di dalamnya berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang terdapat di bawahnya. Dengan adanya dokumen tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang memiliki amanah yang harus dilakukan berdasarkan tugas, fungsi, wewenang, dan sumber daya yang tersedia.

Tabel 2.4  
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan (IKP)	94,25
2.	Meningkatnya Kualitas Kelitbangan dan Inovasi Daerah	Indeks Kualitas Kelitbangan dan Inovasi Daerah (IKKID)	83,18

3.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80,65
----	---	--------------------------------------	-------

No	Sasaran Program	Program	Indikator Program	Target Tahunan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Keselarasan Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD	85,31%	2.733.734.880
2.	Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan dan Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program RKPD dengan RPD	55,89%	1.567.556.415
			Persentase Capaian Kinerja Program	88,44%	

No	Sasaran Program	Program	Indikator Program	Target Tahunan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			RKPD yang mencapai target		
3.	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah dalam Pembangunan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	88,57%	1.294.239.180
			Jumlah Capaian Inovasi Daerah	45 Inovasi	
4.	Meningkatnya Capaian Kinerja Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur		
<b>Jumlah</b>					<b>14.840.900.449</b>



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Penilaian Kinerja Organisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang tahun 2024 sudah dilakukan dan disepakati. Tim pengelola kinerja memiliki tugas untuk melakukan penilaian kinerja seperti mengevaluasi dan mengukur data hasil kinerja selama tahun 2024. Dari penilaian tersebut dapat diketahui apakah kinerja yang sudah dilaksanakan mengalami keberhasilan atau kegagalan. Hasil penilaian kinerja tersebut kemudian akan dilakukan kategorisasi tingkat capaian kerja seperti yang tertera pada sub subbab di bawah ini.

Berdasarkan pengukuran kinerja yang telah dilakukan, berikut adalah capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024.

##### 3.1.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Target dan Realisasi Kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja/ Program	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
1.	<b>Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Indeks Kualitas Perencanaan (IKP)</b>	<b>94,25 Indeks</b>	<b>94,54 Indeks</b>	<b>100,31%</b>	<b>Baik (Berhasil)</b>
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Peresentase Keselarasan Program Renja PD dengan RKPD	85,31%	100%	110,00%	Istimewa (Sangat Berhasil)
	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program RKPD yang mencapai target	67%	91,10%	110,00%	Istimewa (Sangat Berhasil)
		Persentase Keselarasan Program RKPD dengan RPD	72%	100%	110,00%	Istimewa (Sangat Berhasil)

No.	Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja/ Program	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
2.	<b>Meningkatnya Kualitas Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah</b>	<b>Indeks Kualitas Kelitbangan dan Inovasi Daerah (IKKID)</b>	<b>83,18 Indeks</b>	<b>85,53 Indeks</b>	<b>102,83%</b>	<b>Istimewa (Sangat Berhasil)</b>
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kategori Tinggi	88,57%	89,18%	100,69%	Istimewa (Sangat Berhasil)
		Jumlah Capaian Inovasi Daerah	45 Inovasi	71 Inovasi	110,00%	Istimewa (Sangat Berhasil)
3.	<b>Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah</b>	<b>80,65 Nilai</b>	<b>83,39 Nilai</b>	<b>103,40%</b>	<b>Istimewa (Sangat Berhasil)</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur	100%	100%	100%	Istimewa (Sangat Berhasil)

Baerdasarkan tabel 3.1 di atas, dapat diketahui bahwa Indeks Kualitas Perencanaan yang sebesar 94,54 pada tabel di atas telah mengalami perubahan dari target yang tertera pada Renstra yang sebesar 92,89. Target ini mengalami kenaikan dikarenakan adanya penyesuaian terhadap realisasi Indeks Kualitas Perencanaan yang telah melebihi target untuk tahun 2025. Oleh karena itu, target pada tahun 2025 ini harus ditingkatkan dari target yang tertera pada Renstra supaya kriteria Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound (SMART) dapat terpenuhi. Oleh karena itu, mendasar dari target baru yang sebesar 94,25 tersebut serta realisasi atas Indeks Kualitas Perencanaan (IKP) yang sebesar 94,54 maka persentase realisasi Bappeda sebesar 100,31%. Persentase realisasi tersebut membawa Bappeda untuk mendapatkan predikat baik (B).

Adapun melihat tabel tersebut diketahui bahwa Indeks Kualitas Kelitbangan dan Inovasi Daerah (IKKID) adalah 83,18. Seperti diketahui

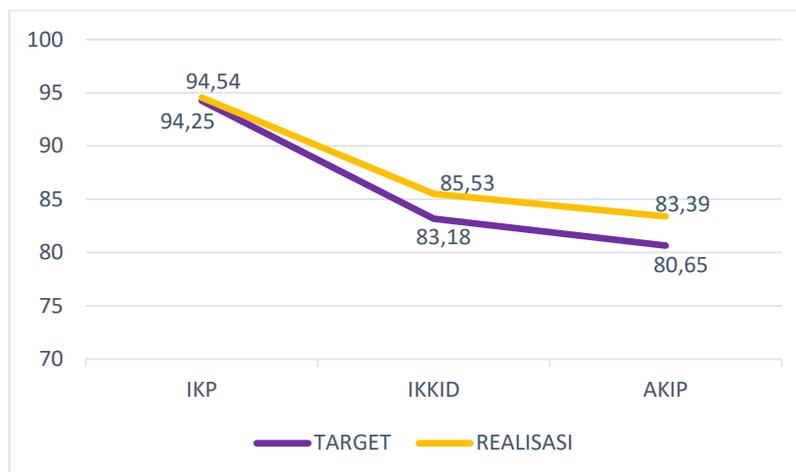
bahwasanya pada tahun 2023, target terkait dengan kelitbangan ini disebut dengan Indeks Inovasi Daerah. Di tahun tersebut, capaian Indeks Inovasi Daerah sudah melampaui target yakni 111,40 persen dengan angka 52,69. Seperti diketahui bahwa penetapan target pada Rencana Strategis dilakukan pada saat realisasi atas capaian tahun 2023 belum diketahui hasilnya. Kemudian melihat hasil capaian tersebut, maka Bappeda memutuskan untuk sedikit menurunkan target IKKID dari yang tertera pada Renstra dengan harapan target tersebut dapat memenuhi kaidah *achievable*. Oleh karena itu, target IKKID untuk tahun 2024 menjadi 83,18 dari yang semula 83,68.

Indikator berikutnya adalah Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah. Berdasarkan tabel 3.1 tersebut, dapat diketahui bahwa target Nilai Evaluasi AKIP adalah sebesar 80,65 dengan realisasi 83,39. Oleh karena itu, persentase realisasi AKIP ini menjadi 103,40% dengan predikat Istimewa. Meskipun realisasi atas AKIP tersebut sudah melebihi target, akan tetapi masih terdapat hal dari masing-masing komponen penilaian yang perlu diperbaiki jika melihat hasil revidu yang dilakukan oleh tim dari Inspektorat,. Komponen pertama yakni Perencanaan Kinerja yang mana Bappeda mendapatkan nilai akhir sebesar 26,40. Dengan bobot penilaian 30%, maka capaian Bappeda pada komponen Perencanaan Kinerja adalah 88,00% atau berpredikat BB. Komponen kedua yakni Pengukuran Kinerja dengan bobot penilaian 30%. Pada komponen ini, Bappeda mendapatkan nilai akhir sebesar 24,49 sehingga persentase capaiannya adalah 81,62% atau berpredikat BB. Kemudian untuk komponen ketiga yaitu Pelaporan Kinerja dengan bobot 15%, Bappeda mendapat nilai akhir sebesar 13,85. Persentase capaian untuk komponen ketiga ini adalah 92,33% atau berpredikat A. Selanjutnya komponen terakhir adalah Evaluasi Kinerja dengan bobot 25%. Bappeda mendapatkan nilai 18,66 yang mana capaian kinerjanya adalah 74,63% atau berpredikat B. Melihat dari persentase capaian tersebut, maka dapat diketahui bahwa yang paling tinggi capaiannya adalah pada komponen Pelaporan Kinerja sedangkan yang paling rendah adalah Evaluasi Kinerja. Pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi tersebut, terdapat hal yang harus diperbaiki untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Hal ini adalah belum dimanfaatkannya tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dengan maksimal dalam upaya perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Hal ini diharapkan dapat mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja Bappeda.

Adapun perbandingan target capaian kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 3.1

Komparasi Perbandingan Target dengan Capaian per Sasaran Strategis



Berdasarkan tabel 3.1 di atas, maka dapat diketahui bahwasanya semua sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang sudah melampaui dari target. Baik dari IKP, IKKID, dan AKIP.

### 3.1.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan 2 (Dua) Tahun Terakhir

Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang selama periode tahun 2022 s.d. 2024 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2

Pencapaian Kinerja Bappeda Tahun 2021-2023

No.	Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	<b>Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Indeks Kualitas Perencanaan</b>	<b>94,25</b>	<b>93,95</b>	<b>94,26</b>	<b>94,54</b>
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program RKPD yang Mencapai Target	67,00%	94,21%	95,41%	91,10%
		Persentase Keselarasan Program RKPD dengan RPD	72,00%	71,3%	93,80%	100,00%

No.	Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program Renja PD dengan RKPD	85,31%	98,25%	98,37%	100,00%
2.	<b>Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah</b>	<b>Indeks Inovasi Daerah (IID)</b>	-	<b>47,04</b>	<b>52,69</b>	-
	<b>Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah</b>	<b>Indeks Kualitas Kelitbangan dan Inovasi Daerah (IKKID)</b>	<b>83,18</b>	-	-	<b>85,53</b>
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kategori Tinggi	88,57%	77,78%	82%	89,18%
		Persentase Peningkatan Inovasi Daerah	-	10%	36%	-
		Jumlah Capaian Inovasi Daerah	45 Inovasi	-	-	71 Inovasi
3.	<b>Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah</b>	<b>80,65</b>	<b>80,13</b>	<b>80,17</b>	<b>83,39</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur	100%	100%	101%	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa mayoritas pencapaian atau realisasi sasaran dan program pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun mulai tahun 2022, 2023, sampai dengan tahun 2024. Hal ini bisa dilihat dari realisasi Indeks Kualitas Perencanaan (IKP) dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 secara berturut-turut sebesar 93,95; 94,26; dan 94,54. Untuk nilai IKKID juga mengalami kenaikan dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Indikator untuk menilai kualitas kelitbangan pada tahun 2024 ini berbeda dengan indikator yang digunakan untuk penilaian pada tahun 2022 dan 2023. Pada dua tahun ke belakang, indikator yang digunakan adalah Indeks Inovasi Daerah (IID) sedangkan pada tahun 2024 yang digunakan adalah

Indeks Kualitas Kelitbangan dan Inovasi Daerah (IKKID). Pada tahun 2022 ke 2023, IID mengalami kenaikan dari 47,04 menjadi 52,69. Adapun untuk 2024, IKKID memiliki realisasi sebesar 85,53. Kemudian untuk Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah juga mengalami kenaikan selama tiga tahun berturut-turut dari 80,13; 80,17; hingga 83,39.

### 3.1.3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah

Berikut merupakan perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah selama dua tahun terakhir sebagai berikut.

Tabel 3.3  
Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan  
Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Target Akhir RPD/ Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
1.	<b>Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Indeks Kualitas Perencanaan (IKP)</b>	<b>93,26</b>	<b>94,54</b>	<b>101,37%</b>
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD	85,89%	100%	116,43%
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program RKPD dengan RPD	57,12%	100%	175,07%
		Persentase Capaian Kinerja Program RKPD yang mencapai target	88,78%	91,10%	102,61%
2.	<b>Meningkatnya Kualitas Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah</b>	<b>Indeks Kualitas Kelitbangan dan Inovasi Daerah (IKKID)</b>	<b>87,09</b>	<b>85,53</b>	<b>98,21%</b>
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	92,73%	89,18%	96,17%
		Jumlah Capaian Inovasi Daerah	150 Inovasi	71 Inovasi	47,33%
3.	<b>Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah</b>	<b>80,67</b>	<b>83,39</b>	<b>103,37%</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur	100%	100%	100%

Melihat pada tabel 3.3 di atas, dapat diketahui bahwasanya realisasi atas dua dari tiga sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sudah melampaui target akhir Renstra. Indikator yang tingkat kemajuannya sudah melampaui target akhir periode Renstra 2024-2026 adalah pada Indeks Kualitas Perencanaan (IKP) dan Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah. Untuk Indeks Kualitas Perencanaan memiliki tingkat kemajuan sebesar 101,37 persen. Kemudian untuk Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah 103,37 persen. Adapun untuk Indeks Kualitas Kelitbangan dan Inovasi Daerah (IKKID) adalah 98,21 persen. Untuk capaian dari IKKID memang masih berproses dari 2024 menuju 2026 yang mana secara target di 2024 di bawah tahun 2026 dan akan terus mengalami peningkatan secara target dan realisasi hingga di tahun 2026.

### 3.1.4. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Realisasi Kinerja Level Nasional dan Internasional

Apabila dilihat dari kinerja antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tertera pada tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4  
Perbandingan Realisasi Kinerja Bappeda Kabupaten Jombang,  
Bappeda Provinsi Jawa Timur, dan Bappenas Tahun 2024

Bappeda Jombang			Bappeda Jawa Timur			Bappenas			Ket.
Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	
<b>Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan</b>	<b>Indeks Kualitas Perencanaan</b>	<b>94,54</b>				<b>Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional</b>	<b>Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional</b>	<b>98,82</b>	
- Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program RENJA Perangkat Daerah dengan RRPD	100%		Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan	100%				
- Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program RRPD dengan RPD	100%							
	Persentase Capaian Kinerja Program RRPD yang mencapai target	91,10%		Persentase Capaian Target Program	80%	Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional	Persentase Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional	99,67%	
<b>Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah</b>	<b>83,39</b>	<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai evaluasi Implementasi SAKIP</b>	<b>92,76</b>				
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur	100%							

Bappeda Jombang			Bappeda Jawa Timur			Bappenas			Ket.
Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	
Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Indeks Kualitas Kelitbangan dan Inovasi Daerah	85,53							
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kategori tinggi	89,19%				Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner	Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang Dijalankan oleh K/L	99,71%	
	Jumlah Capaian Inovasi Daerah	71 Inovasi							

Sumber: Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2024 dan Laporan Kinerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 2024 (dapat diakses pada <https://bit.ly/benchmarklkjip2024>)

### 3.1.5. Analisis atas Realisasi Kinerja

Pada tahun 2024, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang memiliki tiga indikator kinerja yang telah dilakukan pengukuran. Pengukuran tersebut apabila dilakukan analisis lebih lanjut, dapat dilihat seperti di bawah ini.

#### 1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran Bappeda Kabupaten Jombang yaitu Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah menggunakan satu indikator yang digunakan untuk pengukuran. Indikator tersebut adalah Indeks Kualitas Perencanaan (IKP). Data yang digunakan dalam pengukuran IKP merupakan data dokumentatif yaitu data yang diperoleh melalui hasil notulensi atau kegiatan yang telah dilakukan. Bidang-bidang yang terdapat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki tugas untuk memberikan atau menyediakan data-data yang berkaitan.

Metode dalam melakukan pengukuran Indeks Kualitas Perencanaan mendasar dari Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang dengan penilaian sebagai berikut.

- a. Aspek Proses dengan bobot persentase 20%
- b. Aspek Isi dengan bobot persentase 50%
- c. Aspek Tindak Lanjut Hasil Perencanaan dengan bobot persentase 30%

Adapun untuk tahapan penyusunan atau pengukuran lebih lanjut dapat dilihat pada Dokumen Indeks Kualitas Perencanaan.

#### a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2024 atas sasaran Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, menunjukkan bahwa sasaran strategis kesatu telah tercapai dengan

persentase 100,31 persen. Ketercapaian sasaran ini diukur dengan satu indikator yaitu Indeks Kualitas Perencanaan (IKP).

Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah didukung oleh seluruh bidang yang berkaitan dengan perencanaan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang. Bidang-bidang tersebut meliputi Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Bidang Pengembangan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang; Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; serta Bidang Ekonomi yang sesuai dengan rentang kendali masing-masing bidang.

Keberhasilan dalam pencapaian Indeks Kualitas Perencanaan tersebut didukung dengan adanya berbagai macam kegiatan seperti di bawah ini.

- 1) Melakukan pengarahan dan pendampingan kepada seluruh Perangkat Daerah dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan.
  - 2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan dan pencapaian kinerja pada tiap-tiap triwulan.
  - 3) Mengusulkan pokok-pokok pikiran DPRD dalam RKPD yang sesuai dengan target pemerintah daerah dengan cara berkomunikasi dengan DPRD terkait arah kebijakan dan target yang tertuang dalam RPJMD.
  - 4) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Jombang.
  - 5) Mengumpulkan aspirasi atau usulan dari masyarakat secara *bottom up* guna mengetahui kebutuhan masyarakat di tingkat desa yang harus diperhatikan sesuai prioritas pembangunan daerah dengan program Jombang Berkadang.
  - 6) Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan usulan arah dan perencanaan pembangunan sehingga pembangunan yang akan dilakukan dapat terencana dengan baik.
- b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
- Realisasi untuk sasaran pertama dalam tiga tahun terakhir yaitu 2024, 2025, dan 2026 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan dengan nilai Indeks Kualitas Perencanaan berturut-turut 93,95; 94,26; dan 94,54. Nilai tersebut sudah terealisasi di atas target.

- c. Perbandingan Progres Realisasi Kinerja dengan Target yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1 dengan Renstra SKPD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan (IKP)	93,26	94,54	101,37%

Berdasarkan tabel 3.5 di atas, dapat diketahui bahwasanya realisasi dari Indeks Kualitas Perencanaan (IKP) yang sebesar 94,54 tersebut sudah melampaui target akhir yang sebelumnya ditetapkan pada Renstra yaitu 93,26. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa Indeks Kualitas Perencanaan pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan target akhir Renstra memiliki tingkat kemajuan 101,37 persen.

- d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Sasaran Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah didukung dengan adanya beberapa program sebagai berikut.

- 1) Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Alokasi anggaran guna mendukung Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah sebesar Rp1.567.556.415 dan terealisasi sebesar Rp1.552.918.425 atau sebesar 99,07 persen. Kinerja Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah diukur dengan menggunakan indikator Persentase Keselarasan Program RKPD dengan RPD dan Persentase Capaian Kinerja Program RKPD yang mencapai target. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah didukung oleh kegiatan yang terdapat pada bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Capaian Indikator Persentase Keselarasan Program RKPD dengan RPD adalah sebesar 110,00% dengan target 72% dan terealisasi 100%. Data tersebut berdasarkan dokumen yang tercantum pada dokumen kajian Indeks Kualitas Perencanaan.

2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Alokasi anggaran guna mendukung Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebesar Rp2.733.734.880 dan terealisasi Rp2.701.345.107 atau sebesar 98,82%. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah didukung oleh kegiatan yang terdapat pada bidang Ekonomi, bidang Pengembangan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang, serta bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Capaian Indikator Persentase Keselarasan Program RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD adalah sebesar 110,00% dengan target 85,31% dan terealisasi 100%. Data mendasar dari hasil pengukuran pada dokumen Kajian IKP Tahun 2024.

2. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah dalam Pembangunan Daerah.

Kualitas dari Inovasi Daerah untuk Kabupaten Jombang telah dilakukan penilaian oleh Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11 – 4898 Tahun 2024 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2024, diketahui bahwa Indeks Inovasi untuk Kabupaten Jombang di tahun 2024 adalah sebesar 59,40 dengan kategori inovatif. Nilai dari Indeks Inovasi ini kemudian menjadi salah satu komponen untuk mengukur penilaian Indeks Kualitas Kelitbangan dan Inovasi Daerah yang menghasilkan angka 85,53.

Dari penilaian tersebut, dapat dilakukan perbandingan terkait Inovasi Daerah seperti di bawah ini.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Diketahui bahwa realisasi Indeks Kualitas Kelitbangan dan Inovasi Daerah yang merupakan indikator kinerja kedua telah melampaui target dengan persentase realisasi capaian sebesar 102,83%. Sasaran strategis ini didukung oleh adanya penyusunan dokumen-dokumen penelitian dan pengembangan seperti melalui dokumen kajian PPMBK (Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Berbasis Kinerja) serta penyelenggaraan kegiatan Krenova.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Diketahui bahwa di tahun 2022 dan 2023, indikator yang digunakan untuk mengukur terkait dengan inovasi yang ada di Jombang adalah IID (Indeks Inovasi Daerah) dengan realisasi berturut-turut 47,04 dan 52,69. Kemudian, di tahun 2024 hingga 2026, indikator yang digunakan untuk mengukur ini adalah Indeks Kualitas Kelitbangan dan Inovasi Daerah (IKKID) dengan realisasi sebesar 85,53. Oleh karena itu, jika melihat realisasinya maka tampak kenaikan yang signifikan dari tahun 2023 ke 2024. Hal ini dikarenakan formula perhitungan yang digunakan berbeda.

- c. Perbandingan Progres Realisasi Kinerja dengan Target yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 3.6

## Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2 dengan Renstra SKPD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Indeks Kualitas Kelitbangan dan Inovasi Daerah (IKKID)	87,09	85,53	98,21%

Dari tabel di atas, terlihat bahwa kinerja Indeks Kualitas Kelitbangan dan Inovasi Daerah (IKKID) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang tahun 2023 belum melampaui target akhir Rencana Strategis dengan tingkat kemajuan 98,21 persen. Capaian ini belum mencapai 100% karena memang masih berprogres yang akan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga akhir periode Renstra dengan target 87,09.

- d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Sasaran Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah tersebut ditunjang oleh satu program yaitu Program Penelitian dan Pengembangan yang didukung dengan dua indikator program sebagai berikut.

- 1) Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kategori tinggi dengan target 88,57% dan realisasi 89,18% atau memiliki ketercapaian 100,69%.
- 2) Jumlah Capaian Inovasi Daerah adalah mencapai 71 inovasi dari 45 inovasi dengan capaian 110,00%.

Hasil kinerja yang dilaksanakan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut.

- 1) *Indeks Good Governance*
- 2) Indeks Kesalehan Sosial
- 3) Indeks Kajian Agribisnis
- 4) Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Berbasis Kinerja

### 3. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

#### a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Diketahui bahwa realisasi AKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang yang mana merupakan sasaran strategis ketiga memiliki capaian 103,40 persen dengan nilai 83,39 dari target sebesar 80,65. Meski nilai AKIP sudah melampaui target, akan tetapi masih terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki guna semakin meningkatnya nilai evaluasi di tahun-tahun yang akan datang.

#### b. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Pada tahun 2022, 2023, dan 2024 berturut-turut nilai AKIP Bappeda yaitu 80,13; 80,17; dan 83,39. Nilai pada tahun 2024 ini sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 nomor X.700/525/415.15/2024.

#### c. Perbandingan Progres Realisasi Kinerja dengan Target yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 3.7

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3 dengan Renstra SKPD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80,67	83,39	103,37%

Dari tabel tersebut diketahui bahwa realisasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang telah mencapai kemajuan 103,37 persen dari target akhir Rencana Strategis.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah didukung oleh program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang. Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp9.245.369.974, dan terealisasi sebesar Rp8.855.766.984 atau 95,79% dengan indikator program Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur dengan capaian sebesar 100 persen dari target 100 persen.

### 3.2 Realisasi Anggaran

#### 3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran

Tabel 3.8

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
<b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan</b>							
<b>Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Indeks Kualitas Perencanaan (IKP)</b>	<b>94,25</b>	<b>94,54</b>	<b>100,31%</b>	<b>4.301.291.295</b>	<b>4.254.263.532</b>	<b>98,91%</b>
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Peresentase Keselarasan Program Renja PD dengan RKPD	85,31%	100%	110,00%	2.733.734.880	2.701.345.107	98,82%
Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program RKPD yang mencapai target	67,00%	91,10%	110,00%	1.567.556.415	1.552.918.425	99,07%
	Persentase Keselarasan Program RKPD dengan RPD	72,00%	100%	110,00%			

<b>Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah</b>	<b>Indeks Inovasi Daerah (IID)</b>	<b>83,18</b>	<b>85,53</b>	<b>102,83%</b>	<b>1.294.239.180</b>	<b>1.284.657.815</b>	<b>99,26%</b>
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kategori Tinggi	88,57%	89,18%	100,69%	1.294.239.180	1.284.657.815	99,26%
	Jumlah Capaian Inovasi Daerah	45 Inovasi	71 Inovasi	110,00%			
<b>Sasaran 3: Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah</b>	<b>80,65</b>	<b>83,39</b>	<b>103,40%</b>	<b>9.245.369.974</b>	<b>8.855.766.984</b>	<b>95,79%</b>
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja Aparatur	100%	100%	100%	9.245.369.974	8.855.766.984	95,79%

Berdasarkan tabel 3.8 di atas, dapat diketahui bahwa capaian realisasi anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang tahun 2024 adalah sebesar 96,99 persen. Persentase tersebut merupakan realisasi atas keseluruhan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang yang sebesar Rp14.394.688.331 dari total Rp14.840.900.449. Adapun realisasi tanpa alokasi gaji dan tunjangan adalah sebesar 97,96 persen dengan realisasi anggaran sebesar Rp7.752.502.296 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.9  
Anggaran dan Realisasi Belanja (Tanpa Gaji dan Tunjangan ASN)  
Tahun Anggaran 2024

KODE						URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2024	REALISASI 2023	% REALISASI
1						2	3	4	4 / 3
5						<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>7.914.145.275</b>	<b>7.752.502.296</b>	<b>97,96</b>
5	01					<b>PERENCANAAN</b>	<b>6.619.906.095</b>	<b>6.467.844.481</b>	<b>97,70</b>
5	01	01				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	2.318.614.800	2.213.580.949	95,47
5	01	01	2	01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	110.847.700	109.758.450	99,02
5	01	01	2	01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	106.898.500	105.942.450	99,11
5	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.949.200	3.816.000	96,63
5	01	01	2	02		<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	192.172.200	192.007.100	99,91
5	01	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	186.166.000	186.163.500	100
5	01	01	2	02	05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.698.200	1.535.800	90,44
5	01	01	2	02	07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.308.000	4.307.800	100
5	01	01	2	05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	27.600.000	26.910.000	97,5
5	01	01	2	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	27.600.000	26.910.000	97,5
5	01	01	2	06		<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	1.050.333.106	972.405.512	92,58
5	01	01	2	06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36.784.200	36.678.500	99,71

KODE						URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2024	REALISASI 2023	% REALISASI
1						2	3	4	4 / 3
5	01	01	2	06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	341.447.400	339.309.300	99,37
5	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.750.900	12.704.000	92,39
5	01	01	2	06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	175.351.100	151.027.300	86,13
5	01	01	2	06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.274.000	41.078.150	99,53
5	01	01	2	06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.006	4.451.500	74,19
5	01	01	2	06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	435.725.500	387.156.762	88,85
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2</b>	<b>08</b>		<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>497.094.594</b>	<b>481.259.737</b>	<b>96,81</b>
5	01	01	2	08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	153.115.474	145.627.564	95,11
5	01	01	2	08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	343.979.120	335.632.173	97,57
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2</b>	<b>09</b>		<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>440.567.200</b>	<b>431.240.150</b>	<b>97,88</b>
5	01	01	2	09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.710.000	75.982.300	99,05
5	01	01	2	09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	211.760.000	203.554.300	96,13
5	01	01	2	09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.897.200	15.896.550	100
5	01	01	2	09	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	136.200.000	135.807.000	99,71
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>02</b>				<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>1.567.556.415</b>	<b>1.552.918.425</b>	<b>99,07</b>
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2</b>	<b>01</b>		<b>Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>1.170.752.500</b>	<b>1.158.478.249</b>	<b>98,95</b>
5	01	02	2	01	07	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.170.752.500	1.158.478.249	98,95
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2</b>	<b>02</b>		<b>Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>221.205.000</b>	<b>219.745.426</b>	<b>99,34</b>
5	01	02	2	02	01	Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	221.205.000	219.745.426	99,34

KODE						URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2024	REALISASI 2023	% REALISASI
1						2	3	4	4 / 3
5	01	02	2	03		<b>Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	175.598.915	174.694.750	99,49
5	01	02	2	03	03	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	175.598.915	174.694.750	99,49
5	01	03				<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	2.733.734.880	2.701.345.107	98,82
5	01	03	2	01		<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	743.494.300	740.460.169	99,59
5	01	03	2	01	01	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	234.752.150	232.817.049	99,18
5	01	03	2	01	04	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	79.506.400	79.505.620	100
5	01	03	2	01	05	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	288.758.200	287.719.950	99,64
5	01	03	2	01	08	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	140.477.550	140.417.550	99,96
5	01	03	2	02		<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>			
5	01	03	2	02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	339.543.000	338.473.790	99,69
5	01	03	2	02	04	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	393.728.213	372.751.808	94,67
5	01	03	2	02	05	Koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	137.428.893	136.918.608	99,63
5	01	03	2	02	08	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	110.579.250	108.196.600	97,85
5	01	03	2	03		<b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	1.008.961.224	1.004.544.132	99,56
5	01	03	2	03	01	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	213.798.974	211.477.860	98,91

KODE						URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2024	REALISASI 2023	% REALISASI
1						2	3	4	4 / 3
						Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
5	01	03	2	03	04	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	161.737.350	161.677.550	99,96
5	01	03	2	03	05	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	489.173.650	488.112.316	99,78
5	01	03	2	03	08	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah	144.251.250	143.276.406	99,32
<b>5</b>	<b>05</b>					<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	<b>1.294.239.180</b>	<b>1.284.657.815</b>	<b>99,26</b>
5	05	02				<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	1.294.239.180	1.284.657.815	99,26
5	05	02	2	01		<b>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	227.039.000	226.015.950	99,55
5	05	02	2	01	01	Sub Kegiatan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	227.039.000	226.015.950	99,55
5	05	02	2	02		<b>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	305.570.000	303.212.615	99,23
5	05	02	2	02	01	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	305.570.000	303.212.615	99,23
5	05	02	2	03		<b>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	430.587.500	428.807.400	99,59
5	05	02	2	03	02	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	325.388.500	324.030.300	99,58
5	05	02	2	03	04	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	105.199.000	104.777.100	99,6
5	05	02	2	04		<b>Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	331.042.680	326.621.850	98,66
5	05	02	2	04	01	Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	293.847.180	291.962.400	99,36
5	05	02	2	04	04	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil - Hasil Kelitbangan	37.195.500	34.659.450	93,18

Realisasi gaji dan tunjangan adalah sebagai berikut.

5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.926.755.174	6.642.186.035	95,89
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	92.557.500	85.760.000	92,66
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	741.578.082	705.221.817	95,1
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	241.438.750	234.470.000	97,11
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	55.160.375	49.185.000	89,17
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	14.972.840	14.356.997	95,89
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.986.540.787	1.899.309.227	95,61
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	234.520.141	220.256.950	93,92
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.421.749.870	2.344.154.286	96,8
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	132.200.503	126.879.840	95,98
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	11.814.777	11.405.611	96,54
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	989.140.527	946.366.558	95,68
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.042.280	4.785.665	94,91
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	38.742	34.084	87,98

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwasanya realisasi anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang adalah sebesar 95,89 persen. Beberapa hal yang menyebabkan anggaran gaji dan tunjangan tidak bisa teralisasi 100 persen adalah sebagai berikut.

1. Asumsi perencanaan anggaran sebagaimana pedoman penyusunan APBD, yaitu adanya *accress* untuk gaji dan tunjangan dengan adanya pindah/masuk pegawai negeri sipil di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang ditetapkan oleh ketentuan penyusunan APBD.
2. Adanya dua pegawai yang tutup usia di tahun 2024.
3. Adanya Tambahan Penghasilan yang direalisasikan berdasarkan obyektifitas sehingga mengakibatkan adanya tunjangan yang terserap tidak secara penuh.

### 3.2.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

#### 1. Efisiensi Anggaran terhadap Kinerja

Realisasi anggaran belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 berdasar dari tabel 3.9 adalah sebesar 97,96 persen sedangkan rata-rata capaian kinerja utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang adalah sebesar 102,18 persen. Berdasar dari data tersebut, maka efisiensi anggaran terhadap kinerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut.

Tabel 3.10  
Efisiensi Anggaran terhadap Kinerja

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
<b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan</b>		<b>102,18%</b>	<b>97,96%</b>	<b>4,22%</b>
<b>Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Indeks Kualitas Perencanaan (IKP)</b>	<b>100,31%</b>	<b>98,95%</b>	<b>1,36%</b>
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program Renja PD dengan RKPD	100,00%	98,82%	1,18%
Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program RKPD yang mencapai target	135,97%	99,07%	36,90%
	Persentase Keselarasan Program RKPD dengan RPD	138,89%		39,82%
<b>Sasaran 2: Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah dalam Pembangunan Daerah</b>	<b>Indeks Kualitas Kelitbangan dan Inovasi Daerah (IKKID)</b>	<b>102,83%</b>	<b>99,26%</b>	<b>3,57%</b>
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kategori Tinggi	100,69%	99,26%	1,43%
	Jumlah Capaian Inovasi Daerah	157,78%		58,52%
<b>Sasaran 3: Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah</b>	<b>103,40%</b>	<b>95,47%</b>	<b>7,93%</b>
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur	100,00%	95,47%	4,53%

## 2. Efisiensi Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja

Jumlah pegawai yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang adalah 43 orang sedangkan jumlah pegawai seharusnya sesuai dengan analisis jabatan adalah 156 sehingga persentase keterpenuhan pegawainya adalah 28,85 persen. Oleh karena itu, persentase jumlah pegawai. Adapun rata-rata capaian kinerja utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang adalah sebesar 102,18% sehingga efisiensi penggunaan sumber daya manusia terhadap kinerja Bappeda adalah sebesar berikut.

$$102,18\% - 28,85\% = 73,33\%$$

## 3. Efisiensi Sumber Daya Sarana Prasarana terhadap Kinerja

Berdasarkan dari RKBMD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, diketahui bahwa terdapat perbedaan jumlah sarana prasarana yang diperlukan atau dibutuhkan oleh Bappeda dengan jumlah sarana prasarana yang tersedia sebagai berikut.

Tabel 3.11

Efisiensi Sumber Daya Sarana Prasarana

Uraian	Rata-Rata Capaian Kinerja Utama	Jumlah Ketersediaan	Standar Kebutuhan	Persentase Ketersediaan	Efisiensi
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (c) / (d)	(f) = (b) - (e)
Sarana Prasarana	102,18%	842	888	94,82%	7,36%

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih antara sarana prasarana yang seharusnya tersedia dengan eksisting sejumlah 46 item (d – c). Dari jumlah tersebut, maka dapat dihitung persentase keterpenuhan sarana prasarana di Bappeda dengan persentase sebesar 94,82%. Persentase tersebut dapat digunakan untuk menghitung efisiensi atas sumber daya sarana prasarana terhadap kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sebesar 7,36%.

### 3.3 Upaya Perbaikan Kinerja

Berikut merupakan upaya-upaya perbaikan kinerja pada Bappeda.

1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan atas Indeks Kualitas Perencanaan

Berdasarkan tabel yang tertera pada sub bab sebelumnya, diketahui bahwasanya Indeks Kualitas Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2024 memiliki target 94,25 dan realisasi sebesar 94,54 dengan persentase capaian mencapai 100,31%. Pencapaian kinerja indikator Indeks Kualitas Perencanaan tersebut tidak lepas dari beberapa faktor penghambat dan pendorong. Faktor pendorong dan penghambat tersebut di antaranya tertera pada tabel berikut.

Tabel 3.12

Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Tindak Lanjut  
Sasaran Pertama (IKPD)

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut
1. Adanya komitmen dari segenap karyawan dalam upaya melakukan koordinasi 2. Tanggung jawab setiap karyawan selalu update peraturan sehingga perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Adanya komunikasi yang efektif antara staf, rekan kerja maupun dengan atasan baik di level staf maupun pimpinan. 4. Komitmen lintas sektor maupun	1. Kurangnya kesadaran OPD terkait dengan ketepatan waktu pengumpulan laporan sehingga membutuhkan lebih banyak waktu untuk melakukan integrasi, sinkronisasi, dan sinergisasi perencanaan daerah. 2. Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana maupun teknologi terkini terutama tentang sistem informasi yang dibarengi dengan kendala dalam kemampuan pengoperasian komputer baik dari segi software maupun hardware yang dapat	1. Melakukan sosialisasi dan memberikan <i>reminder</i> atau pengingat secara berkala terkait batas waktu penyerahan/ pengumpulan laporan 2. Memberikan pendampingan sekaligus arahan terkait tutorial penggunaan atau pemakaian sarana dan prasarana terkait teknologi hingga penggunaan <i>software</i> dan <i>hardware</i> baik secara langsung maupun tidak langsung kepada karyawan yang terkendala guna meminimalisasi kesalahan.

<p>antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat terhadap pencapaian pembangunan daerah seperti dalam bentuk pembuatan kebijakan/ aturan yang mendukung percepatan pembangunan daerah.</p> <p>5. Adanya Kebijakan melalui Jombang Berkadang untuk mensinkronkan antara kebijakan pemerintah daerah dengan usulan masyarakat dan adanya komunikasi dengan legislatif perihal prioritas pembangunan daerah sehingga pokok-pokok pikiran dewan tidak keluar dari program prioritas</p>	<p>menghambat proses pekerjaan.</p> <p>3. Tempat rapat/tempat kerja yang masih kurang mencukupi yang terkadang dapat mengganggu kelancaran desk.</p> <p>4. Banyaknya program kegiatan, target, indikator serta OPD sehingga perlu banyak waktu dalam melakukan penyeselarasan dokumen-dokumen perencanaan serta capaian ditingkat kabupaten maupun OPD.</p> <p>5. Banyaknya usulan yang diterima dari masyarakat dengan jumlah anggaran pemerintah daerah yang terbatas.</p>	<p>3. Pembagian jadwal yang sesuai serta penggunaan aplikasi <i>video conference</i> ketika ruang rapat sudah penuh.</p> <p>4. Melaksanakan desk program, kegiatan dan subkegiatan sekaligus pelaksanaan monitoring dan evaluasi tiap triwulanan dengan memberikan pendampingan sesuai dengan rentang kendali bidang Bappeda serta pelaksanaan yang juga dilakukan melalui media elektronik.</p> <p>5. Menentukan program-program prioritas pembangunan daerah serta mengarahkan usulan masyarakat agar sesuai dengan prioritas daerah.</p>
---	--	---

2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan atas Indeks Kualitas Kelitbangan dan Inovasi Daerah (IKKID)

Berdasarkan keterangan yang tertera pada tabel di atas diketahui bahwasanya target Indeks Kualitas Kelitbangan dan Inovasi Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebesar 83,18 dengan realisasi mencapai 85,53 atau 102,83 persen. Besarnya persentase tersebut bisa diperoleh karena didukung oleh beberapa faktor pendorong berikut. Meskipun terdapat beberapa hambatan dalam pencapaian target ini, akan tetapi hambatan tersebut sudah ditindaklanjuti dengan aksi-aksi seperti di bawah ini.

Tabel 3.13  
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Tindak Lanjut  
Sasaran Kedua (IKKID)

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut
<p>1. Koordinasi dan dukungan dari segenap stakeholder (baik internal maupun eksternal), akademisi serta OPD terkait pengumpulan hasil inovasi perangkat daerah</p> <p>2. Partisipasi kelompok masyarakat dalam turut serta menyelesaikan permasalahan yang ada melalui kontrak Kerjasama berbasis kinerja berjalan lancar dan menghasilkan komitmen</p>	<p>1. Adanya perubahan kebijakan metode pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah</p> <p>2. Belum adanya kebijakan daerah yang mendorong OPD beserta aparaturnya untuk berinovasi dalam penyelenggaraan pelayanan maupun pemerintahan</p> <p>3. Belum semua organisasi perangkat daerah memahami pentingnya Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah</p>	<p>1. Menyesuaikan kebijakan yang ada terkait inovasi daerah dengan kebijakan baru yang berhubungan dengan metode pengukuran serta penilaian Indeks Inovasi Daerah.</p> <p>2. Merumuskan kebijakan terkait inovasi daerah yaitu masing-masing perangkat daerah agar mengusulkan inovasi yang dimiliki untuk memperkaya inovasi Kabupaten Jombang</p>

<p>penanganan secara berkelanjutan</p> <p>3. Aplikasi e-litbang sudah mulai dikenal masyarakat, sehingga aspirasi terkait dengan kelitbangan atau inovasi maupun keperluan dalam kajian kelitbangan dapat tersampaikan dengan baik.</p>	<p>dan indikator pendukungnya</p>	<p>3. Melakukan penyebaran informasi melalui sosialisasi dengan peserta dari seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Jombang sehingga masing-masing Perangkat Daerah dapat memahami pentingnya dari inovasi suatu daerah.</p>
---	-----------------------------------	---

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan atas nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai nilai AKIP yang diharapkan dapat sesuai dengan target, terdapat beberapa faktor yang mendorong dan juga menghambat yang telah ditindaklanjuti seperti di bawah ini.

Tabel 3.14

Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Tindak Lanjut Sasaran Ketiga (AKIP)

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Tindak Lanjut
<p>1. Adanya Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu PerMenPANRB</p>	<p>1. Belum semua Sumber Daya Manusia (SDM) aparaturnya memahami implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</p>	<p>1. Menetapkan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, melaksanakan monitoring capaian kinerja tiap triwulan, melaksanakan asistensi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi</p>

<p>Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan, Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, PerMenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</p>	<p>2. Masih kurang tertibnya ketepatan waktu pengumpulan laporan sehingga membutuhkan lebih banyak waktu untuk melakukan pembahasan evaluasi.</p> <p>3. Belum optimalnya pemahaman terkait dengan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja.</p> <p>4. Belum diketahui dengan seksama terkait penyesuaian anggaran.</p>	<p>Pemerintah, dan melaksanakan rapat koordinasi sinkronisasi perencanaan program/kegiatan serta penganggaran diinternal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.</p> <p>2. Melaksanakan rapat koordinasi evaluasi capaian kinerja secara berkala dan menyusun surat keputusan tentang pengukuran Indeks Kualitas Perencanaan pada BAPPEDA Kabupaten Jombang.</p> <p>3. Melakukan pengarahannya kepada Sumber Daya Manusia di Bappededa bahwa upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja harus ada di setiap indikator.</p> <p>4. Ketika proses penyesuaian anggaran akan memerhatikan target kinerja yang telah tercapai dan sebaliknya sebagai salah satu dasar dalam melakukan penyesuaian anggaran.</p>
--	---	---

Berdasarkan hasil evaluasi implementasi SAKIP tertanggal 16 Agustus 2024, maka beberapa aksi sebagai tindak lanjut adalah sebagai berikut.

1. Rekomendasi 1  
Kualitas perencanaan telah dilakukan peningkatan melalui tahapan penjenjangan kinerja sesuai ketentuan. Hal ini dapat dilihat dari Bappeda yang telah melakukan identifikasi masalah yang melibatkan seluruh pegawai dengan penjaringan ide/masukan. Dokumen penjenjangan kinerja tersebut dapat diakses pada <https://bit.ly/TLrekomsakip24>.
2. Rekomendasi 2  
Bappeda telah melakukan koreksi atas ketidakselarasan capaian kinerja antar dokumen Pengukuran Kinerja (Kurja) Tribulanan, Dokumen Evaluasi SKP Tribulanan, serta dokumen Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Tribulanan. Seluruh dokumen kinerja individu pada Bappeda tersebut dapat diakses pada laman yang tertera pada nomor satu.
3. Rekomendasi 3  
Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang tentang Mekanisme Pemberian *Reward and Punishment* di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Bappeda telah dilakukan koreksi dengan memberikan kriteria rinci untuk pemberian *reward and punishment* yang dapat diakses pada laman yang tertera pada nomor satu.
4. Rekomendasi 4  
Kualitas pengukuran dan evaluasi kinerja pada periode berikutnya telah mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya. Individu dengan hasil kinerja yang di atas rata-rata dan mendukung capaian kinerja organisasi akan mendapat penghargaan. Hal ini seperti yang telah diatur dalam SK Kepala Bappeda tentang Mekanisme Pemberian *Reward and Punishment* di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang.
5. Rekomendasi 5  
Bappeda telah melakukan rapat internalisasi terkait dengan peningkatan inovasi dan kinerja organisasi. Mendukung hal tersebut, laporan kinerja juga sudah mencantumkan analisis terkait kondisi eksisting agar dapat dijadikan dasar perbaikan pada periode berikutnya seperti yang tercantum dalam laman yang tertera pada nomor satu.
6. Rekomendasi 6

Peningkatan/perbaikan kinerja *outcome* pada Bappeda telah mempertimbangkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebelumnya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang memiliki kinerja yang semuanya melampaui target di tahun 2024. Hal tersebut bisa dilihat dari capaian sasaran strategis yang mana ketiganya memiliki kriteria ketercapaian baik (berhasil). Apabila dilihat dari capaian angkanya, maka persentase sasaran strategis yaitu Indeks Kualitas Perencanaan, Indeks Kualitas Kelitbangan dan Inovasi Daerah, serta Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara berturut-turut sebesar 100,31 persen, 102,83 persen, dan 103,40 persen. Dalam rangka mewujudkan kinerja yang terus semakin baik untuk tahun-tahun berikutnya, maka upaya-upaya dalam menjaga kualitas kinerja akan terus dilakukan.

Laporan Kinerja Tahun 2024 ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang tahun 2024. Penyempurnaan laporan diperlukan untuk periode yang akan datang sehingga kualitas laporan menjadi lebih baik.